



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555  
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

---

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/05.A/I/SK/Set/Bappeda-2021

## **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdiri dari pejabat di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang  
Pada tanggal : 28 Januari 2021



**Kepala,**

**HANSASTRI, SE, Akt, MM, CRrA**

Pembina Utama Madya

19641013 199103 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 050/05.A/I/SK/Set/Bappeda-2021  
Tanggal : 28 Januari 2021  
Tentang : Pembantuan Tim Penyusun  
Rencana Kerja Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi  
Sumatera Barat tahun 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN
Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketua Pelaksana	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan beserta Kasubid. 2. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan beserta Kasubid. 3. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan beserta Kasubid. 4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah beserta Kasubid. 5. Fungsional Perencana 6. Kasubag Lingkup Sekretariat
Sekretariat	Sub Bagian Program

 **Kepala,**  
**HANSASTRI, SE, Ak, MM, CFRA**  
Pembina Utama Madya  
19641013 199103 1 001



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2021

#### TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

#### Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Kerja Daerah untuk periode Tahun 2022.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah, terdiri dari :
  1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  2. Biro Hukum;
  3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
  4. Biro Perekonomian;
  5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
  6. Biro Administrasi Pembangunan;
  7. Biro Organisasi;
  8. Biro Umum; dan
  9. Biro Administrasi Pimpinan.

- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah, terdiri dari :
  - 1. Dinas Pendidikan;
  - 2. Dinas Kesehatan;
  - 3. RS Achmad Muchtar Bukittinggi;
  - 4. RSJ Sa'anin Padang;
  - 5. RSUD Solok;
  - 6. RSUD Pariaman;
  - 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
  - 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 11. Dinas Sosial;
  - 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 14. Dinas Pangan;
  - 15. Dinas Lingkungan Hidup;
  - 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 18. Dinas Perhubungan;
  - 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - 23. Dinas Kebudayaan;
  - 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - 26. Dinas Pariwisata;
  - 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  - 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 29. Dinas Kehutanan;
  - 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Renja Badan Daerah, terdiri dari :
  - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 4. Badan Pendapatan Daerah;
  - 5. Badan Kepegawaian Daerah;
  - 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - 9. Badan Penghubung.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renja bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

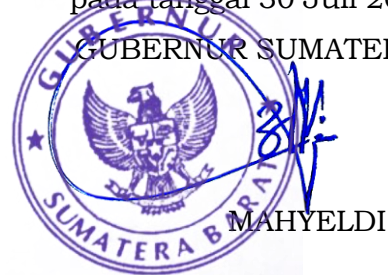
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Renja Bappeda Tahun 2022 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada Tahun 2022. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita dalam melanjutkan pembangunan dan untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022.

Padang, 21 Juli 2021  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Kepala,



HANSASTRI, SE, Ak, MM, CFA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641013 199103 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>II. HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020</b>	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda .....	42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda .....	49
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	51
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	52
<b>III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022</b>	53
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	53
3.2. Tujuan dan Sasaran .....	57
3.3. Program dan Kegiatan .....	59
<b>IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 .....	61
4.2 Pendanaan .....	65
<b>V. PENUTUP</b>	66
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2022, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah tanggal 8 Februari 2020.

Proses penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

- 13) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- 14) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/05.A/I/SK/SET/Bappeda-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Renja Bappeda adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan.

Tujuan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
- b. Sebagai pedoman Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Tahun 2022.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

### Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020 dan Capaian Renstra Bappeda.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

#### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

### Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2020 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 19.446.925.651,00 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program dan 65 kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp. 19.128.042.690,80,- atau sebesar 98.36%

Untuk Belanja Pegawai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp 8.271.289.770,00 telah direalisasikan sebesar Rp 8.205.429.461,00 sebanyak 99.20%. Untuk Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp 10.426.010.151,00 telah direalisasikan sebesar Rp 10.179.026.699,80 atau sebanyak 97.63%. Untuk Belanja Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 749.625.730,00 telah direalisasikan sebesar Rp 743.586.530,00 atau sebanyak 99.19 %

Rincian persentase realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>3.027.134.125,00</b>	<b>2.976.925.768,80</b>	<b>99,45</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.980.000,00	39.980.000,00	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	919.000.000,00	893.081.646,00	97,18	100
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	69.295.000,00	69.011.327,00	99,59	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	902.370.000,00	883.791.766,80	97,94	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.681.583,00	48.669.796,00	99,98	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.951.284,00	35.891.034,00	99,83	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.930.545,00	5.924.145,00	99,89	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	32.040.000,00	32.004.000,00	99,89	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	49.952.000,00	99,90	100
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	820.140.753,00	815.498.694,00	99,43	100
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	103.744.960,00	103.121.360	99,40	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>636.951.314,00</b>	<b>634.512.689,00</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.563.750,00	112.534.323,00	99,97	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	180.000.000,00	179.905.580,00	98,04	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	83.102.364,00	81.474.886,00	98,04	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	32.500.000,00	32.415.000,00	99,74	100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	19.885.200,00	19.769.000,00	99,42	100
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	13.000.000,00	12.995.400,00	99,96	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	30.000.000,00	29.918.500,00	99,73	100
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	165.900.000,00	165.500.000,00	99,76	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.498.200,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	67.500.000,00	67.498.200,00	99,99	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>92,21</b>	<b>100</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
	<b>APARATUR</b>				
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.220.000,00	1.125.000,00	92,21	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>401.063.083,00</b>	<b>395.122.507,00</b>	<b>98,52</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.444.050,00	62.910.577,00	96,13	100
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	254.000.000,00	252.050.000,00	99,23	100
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	38.659.033,00	37.201.930,00	96,23	100
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	42.960.000,00	42.960.000,00	100	100
<b>6</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.278.368.923,00</b>	<b>1.257.928.047,00</b>	<b>98,40</b>	<b>100</b>
1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.926.600,00	19.520.661,00	97,96	100
2	Penyusunan KUA/PPAS APBD	209.096.600,00	209.074.483,00	99,99	100
3	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	571.325.274,00	559.080.501,00	97,86	100
4	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	17.629.749,00	16.381.532,00	92,92	100
5	Penyusunan RKPD	283.522.450,00	282.689.386,00	99,71	100
6	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi perencanaan Pembangunan Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	100	100
7	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	4.788.800,00	4.699.050,00	98,13	100
8	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	141.079.450,00	135.482.434,00	96,03	100
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN</b>	<b>210.624.628,00</b>	<b>205.560.003,00</b>	<b>97,60</b>	<b>100</b>
1	Pengelolaan Website <a href="http://www.bappeda.sumbarprov.go.id">www.bappeda.sumbarprov.go.id</a>	49.960.000,00	49.583.127,00	99,25	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
2	Pengelolaan data dan informasi spasial berbasis GIS untuk Perencanaan pembangunan	8.188.400,00	8.180.805,00	99,91	100
3	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	152.476.228,00	147.796.071,00	96,93	100
<b>8</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.552.773.808,00</b>	<b>5.383.941.015,00</b>	<b>96,96</b>	<b>97,07</b>
1	Kerjasama Ekonomi Regional Dan Internasional	374.116.579,00	359.936.149,00	96,21	100
2	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	18.315.126,00	16.916.337,00	92,36	100
3	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	42.975.917,00	27.543.863,00	64,09	100
4	Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	2.336.283.000,00	2.318.879.526,00	99,26	100
5	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	20.314.282,00	20.314.282,00	100	100
6	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	77.744.830,00	68.715.161,00	88,39	100
7	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	14.298.400,00	14.198.866,00	99,30	100
8	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	170.646.701,00	170.634.991,00	99,99	100
9	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	126.562.528,00	125.426.508,00	99,10	100
10	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	25.801.721,00	25.288.161,00	98,01	100
11	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	14.629.450,00	14.629.450,00	99,67	100
12	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	128.535.600,00	127.188.203,00	98,95	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
13	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15.350.956,00	15.346.995,00	99,97	100
14	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	142.712.450,00	141.770.945,00	99,34	100
15	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	41.183.200,00	36.507.790,00	88,65	100
16	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	13.334.400,00	13.004.555,00	97,53	100
17	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	512.508.200,00	503.263.238,00	98,20	100
18	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	54.635.950,00	54.301.706,00	97,39	100
19	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	54.090.368,00	53.418.413,00	98,76	100
20	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	40.556.500,00	40.480.141,00	99,81	100
21	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	45.772.000,00	45.513.750,00	99,44	100
22	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	51.013.926,00	48.603.264,00	95,27	100
23	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	43.631.451,00	41.311.985,00	94,68	100
24	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	341.428.756,00	335.877.198,00	98,37	100
25	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat	232.188.294,00	231.293.688,00	99,61	100
26	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	76.206.805,00	76.146.433,00	99,62	100
27	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	1.944.261,00	1.944.261,00	100	100
28	Revisi Perda RPJPD Provinsi	172.943.257,00	101.497.467,00	58,69	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
	Sumatera Barat Tahun 2005-2025			
29	Tata Kelola Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	363.048.900,00	354.036.201,00	97,52
	<b>TOTAL</b>	<b>19.446.925.651,00</b>	<b>19.128.042.690,80</b>	<b>98,36</b>

Pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.027.134.125,- dengan indikator kinerja program adalah meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. Pelaksanaan fisik Program ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.976.925.768,80 atau mencapai 99,45%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yaitu:

#### 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.980.000,- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dilakukan antara lain untuk pendukung jasa administrasi (Honor PTT) dan pengiriman surat serta penyediaan benda pos. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.39.980.000,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman surat dan paket untuk kepentingan dinas serta pelaksanaan pembayaran honor PTT di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

#### 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 919.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 893.081.646,- atau 97,18%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon, radio link, dedicated internet dan collocation.

#### 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah,

Dengan alokasi dana sebesar Rp.69.295.000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan jaminan atas penggantian biaya kerusakan kendaraan dinas (asuransi

kendaraan). Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 69.011.327,- atau 99,59%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jaminan perbaikan kendaraan operasional kantor

**4) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Supir Kantor**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 902.370.000,-. Kegiatan ini ditujukan tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan kantor, jasa sopir kantor serta jasa petugas dan peralatan pengamanan kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 883.791.766,80,- atau 97,94%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan, keindahan dan keamanan kantor

**5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.681.583,- Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya alat tulis kantor selama Tahun 2020. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.48.669.796,- atau 99,98%. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan ATK.

**6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.951.284,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan kepentingan dinas. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 35.891.034,00,- atau 99,83%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi Bappeda.

**7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.930.545,- kegiatan ini ditujukan agar tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.924.145,- atau 99,89% Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan penerangan pada bangunan/ruangan yang ada pada kantor Bappeda.

**8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.040.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku. Pelaksanaan fisik

kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 32.004.000,- atau 99,89%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Bappeda dan umum.

**9) Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya makan dan minum. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 49.952.000,- atau 99,90%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor.

**10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 820.140.753,- Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 815.498.694,- atau 99,43%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

**11) Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 103.744.960,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran jasa penceramah agama, instruktur senam, dan jasa publikasi. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 103.121.360,- atau 99,40%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pembinaan Rohani dan Jasmani staf Bappeda serta publikasi

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 636.952.314,- untuk mencapai indikator kinerja program adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu:

**1) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 112.563.750,-, kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai

Rp. 112.534.323,- atau 99,97%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan kantor pakai habis dan peralatan kantor.

**2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terpeliharanya gedung kantor Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 179.905.580,- atau 99,95%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.

**3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 83.102.364,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 81.474.886,- atau 98,04%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 12 unit.

**4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.500.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan AC, Tabung kebakaran dan pompa air. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 32.415.000,- atau 99,74%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.

**5) Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.885.200,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembuatan pagar antar gedung kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 19.769.000,- atau sebesar 99,42%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya gedung kantor yang layak pakai

**6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan soundsystem, telepon dan fax, perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax, kamera serta projector. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 12.995.400,- atau 99,96%. Hasil dari kegiatan ini adalah peralatan alat komunikasi dan studio dalam kondisi baik dan siap pakai.

**7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer dan suku cadang. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 29.918.500,- atau 99,73%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan komputer, laptop, printer layak pakai.

**8) Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 165.900.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya Komputer beserta jaringannya. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 165.500.000,- atau 99,76%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran pekerjaan kantor dengan tersedianya computer dan jaringannya.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi dana sebesar Rp 67.500.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pengadaan pakaian dinas sipil harian PNS/Non PNS yang layak pakai bagi pegawai Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 67.498.200,- atau 99,99%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu; Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.220.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya ASN yang mengikuti Bimtek. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.125.000,- atau 92,21%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas ADM.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 758.210.967,- dengan indikator kinerja program adalah meningkatnya tertib administrasi keuangan. Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan terdiri dari 4 kegiatan dengan total anggaran Rp 401.063.083,00 dan terealisasi sebesar Rp 395.122.507,00 atau 98,52 % dari total anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :

**1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.444.050,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ Bappeda). Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 62.910.577,- atau 96,13%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPJ, LAKIP dan PK)

**2) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 254.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran honor penatausahaan SKPD Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 252.050.000,- atau 99,23%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pengelolaan administrasi keuangan OPD.

**3) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 38.659.033,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya buku kalender perencanaan, Renja dan DPA. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 37.201.930,- atau 96,23%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda.

**4) Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian aset SKPD**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.960.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 42.960.000,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah tertatanya administrasi Aset dengan baik.

**6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.278.368.923,- dan terealisasi sebesar Rp 1.257.928.047,00 atau 98,40% dengan indikator kinerja program adalah persentase

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dan persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu:

**1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.926.600,-. Keluarannya adalah terlaksananya Musrenbang RKPD tahun 2020. Dengan realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 19.520.661,- atau 97,96%. Hasil dari kegiatan adalah tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi program RKPD Tahun 2020 antara stake holders dan kab/kota serta Pusat.

**2) Kegiatan Penyusunan KUA/PPAS APBD,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 209.096.600,- dengan keluaran tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2021. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 209.074.483,- atau 99,99%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2021

**3) Kegiatan Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 571.325.274,- keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Realisasi fisik sampai akhir Desember 2020 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 559.080.501,- atau 97,86%. Hasil dari kegiatan ini adanya implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah oleh OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

**4) Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership)**

Dengan pagu dana sebesar Rp. 17.629.749,- keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Book). Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2020 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 16.381.532,- atau 92,92%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta oleh investor

**5) Kegiatan Penyusunan RKPD,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 283.522.450,- keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku RKPD Tahun 2021 dan RKPD Perubahan 2020. Pelaksanaan

fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 282.689.386,- atau 99,71%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya buku RKPD 2021 sebagai acuan dalam penyusunan KUA PPAS 2021 dan buku RKPD Perubahan 2020 sebagai acuan dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan 2020

**6) Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah,**

Dengan alokasi sebesar Rp. 31.00.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pengelolaan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 31.00.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat.

**7) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana,**

Dengan pagu dana sebesar Rp. 4.788.800,- keluaran dari kegiatan ini adalah persentase realisasi angka kredit fungsional perencana, terlaksananya rapat tim penilai angka kredit perencana, terlaksananya pelatihan penulisan artikel dan karya ilmiah, terlaksananya rapat kerja AP21 Sumbar. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 4.699.050,- atau 98,13% dengan hasil yang dicapai meningkatnya kualitas SDM Perencana Bappeda.

**8) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026,**

Dengan pagu dana sebesar Rp. 141.079.450,- keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 135.482.434,- atau 96,03%. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen RPJMD Teknokratik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

**7. Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan**

Program ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 210.624.628,- dan terealisasi sebesar Rp 205.560.003,- atau 97,60% dengan indikator kinerja program adalah tercapainya sasaran pembangunan sesuai target. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

**1) Kegiatan Pengelolaan Website** [www.bappeda.sumbar-prov.go.id](http://www.bappeda.sumbar-prov.go.id),

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.960.000,- kegiatan ini bertujuan untuk terinformasikannya data dan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan sekretariat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2020, realisasi fisik 100% sedangkan keuangan sebesar Rp. 49.583.127,- atau 99,25%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemui masalah atau kendala yang berarti dengan keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya updating berita dan data pembangunan serta terlaksananya koordinasi pengelola website [www.bappeda.sumbarprov.go.id](http://www.bappeda.sumbarprov.go.id).

**2) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Spasial berbasis GIS untuk perencanaan Pembangunan**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.188.400,- output kegiatan yaitu :

- a) Fasilitasi data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan
- b) Terlaksananya Koordinasi dan Rakor Data spasial
- c) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Tersedianya data dan informasi spasial untuk perencanaan
- b) Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2020, 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp 8.180.805,- atau 99,91%

**3) Kegiatan Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.476.228,- kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya Forum Data Perencanaan Pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan tersedianya Forum Data Perencanaan Pembangunan lingkup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melakukan rapat Koordinasi tentang data dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan koordinasi dan fasilitasi ke kabupaten/kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah : tersajinya data dan informasi dan ter update database, serta data informasi Pembangunan Sumatera Barat sebanyak 5 kali, LPPD Tahun 2020 dengan target kinerja : tersajinya Forum Data dan Informasi, dan ter update database, serta data informasi pembangunan Sumatera Barat

sebanyak 5 kali. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2020 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 147.796.071,- atau sebesar 96,93%.

## **8. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.552.773.808,- realisasi belanja Rp 147.796.071,00 atau 96,93 % indikator kinerja program adalah persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yaitu:

### **1) Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional**

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 374.116.579,- dengan keluaran tersedianya laporan kerjasama ekonomi regional dan internasional. Realisasi Fisik dari pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dan Realisasi Keuangan Rp. 359.936.149,- atau 96,21%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinergitas program bidang ekonomi baik Regional maupun Internasional.

### **2) Kegiatan Harmonisasi Progres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.315.126,- keluaran dari Kegiatan ini adalah : Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi RAD SDGs di Sumatera Barat. Hasil dari kegiatan ini adalah Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs di Sumatera Barat. Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.916.337,- atau 92.36%

### **3) Harmonisasi program/kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.975.917,- kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program P2KP di Sumatera Barat. Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan Anggota Tim Koordinasi Provinsi, Satkerdan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
- b) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c) Monitoring dan evaluasi ke lokasi Program P2KP pada 11 Kabupaten/Kota

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan hasil yang diharapkan terwujudnya

sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.543.863,- atau sebesar 64,09%.

**4) Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)**

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia sebesar Rp. 2.336.283.000,- dengan output kegiatan : Terlaksananya Perencanaan dan implementasi program IPDMIP. Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Meningkatnya pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan pada Program IPDMIP
- b) Realisasi Fisik Kegiatan sampai dengan Desember 2020 adalah 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.318.879.526,- atau 99,26% dengan sisa anggaran sebesar Rp 17.403.474,-

5)

**6) Kegiatan Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp 213.052.500,-. output kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta kerjasama dengan rumusan program perencanaan pembangunan lingkup bidang ekonomi yang bersifat sinergis antar berbagai instansi antara pusat dan daerah, dan adanya laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi daerah berikutnya.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Terjadinya peningkatan efektifitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dengan adanya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan dari berbagai sektor lingkup bidang ekonomi dan pada sektor lainnya yang menunjang pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
- b) Tersedianya data dan informasi tentang rencana pembangunan Bidang Ekonomi.
- c) Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2019 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp201.773.553,-atau94,71% dengan sisa anggaran sebesar Rp 11.278.947,-

**7) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota,**

Dengan alokasi dana sebesar Rp 236.029.500,- kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinir, terintegrasi, sinkronisasi dan sinergisitas dokumen perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a) Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD Provinsi;
- b) Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten/Kota;
- c) Melakukan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota (RPJPD dan RPJMD).
- d) Koordinasi dan konsolidasi ke Pusat tentang evaluasi dokume
- e) perencanaan Kabupaten/Kota

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD Provinsi sebanyak 4 kali;
- b) Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten/Kota sebanyak 4 kali
- c) Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota (RPJPD dan RPJMD) sebanyak 5 kab/kota.
- d) Koordinasi dan konsolidasi ke Pusat tentang evaluasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota;
- e) Verifikasi Renja T2 OPD Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 235.282.708,- atau sebesar 99,68%.

**8) Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP 39/2006,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.487.000,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi/sinkronisasi dan sinergisitas pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006 terhadap pelaksanaan dan dekosentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) di Sumatera Barat.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi Pelaporan Manajerial Triwulanan dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan rapat pemantauan, monitoring dan evaluasi Laporan Manajerial Triwulanan sesuai Aplikasi PP 39/2006 di Kementerian PPN/Bappenas;
- c) Melakukan Pemantauan lapangan pelaksanaan dana APBN kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ke Kabupaten/Kota;
- d) Melakukan koordinasi dan konsolidasi laporan manajerial PP39/2006 ke Pusat/Luar provinsi.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Pemantauan dan Evaluasi Laporan Manajerial Konsolidasi Triwulanan Program kegiatan pembangunan Dana APBN/DIPA Tahun Anggaran 2017 melalui Aplikasi PP 39/2006 (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV) sebanyak 4 kali. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 133.416.694,- atau sebesar 97,75%.

**9) Kegiatan Akselerasi Capaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur,**

Dengan pagu dana sebesar Rp.102.204.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Terlaksananya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program dan kegiatan pada lingkup perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- b) Terlaksananya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi pada Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kabupaten/kota dan Pemerintah pusat.
- b) Pengumpulan data dan informasi ke Kabupaten/kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi serta pengumpulan data data dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Tahun 2019.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran pembangunan pada Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- b) Meningkatnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, akuntabel dan transparan  
Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.102.107.968,- atau sebesar 99,91%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah : Belum sepenuhnya SKPD Lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempedomani pencapaian sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi II yakni Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dengan beberapa sasaran strategis yakni : 1) Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur; 2) Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur; 3) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 4) Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan; dan 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Solusi antara lain :

- a) Perlu koordinasi yang intens dengan SKPD Lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi II.
- b) Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

#### **10) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan**

Dengan pagu dana sebesar sebesar Rp.418.010.000,-. output kegiatan yaitu : terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai regulasi yang berlaku, tersedianya data dan informasi untuk menunjang

perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dan terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan antar OPD dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan sesuai mekanisme perencanaan yang ditetapkan
- b) Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup infrastruktur dan kewilayahan
- c) Tersedianya data dan informasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
- d) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan sektor infrastruktur dan kewilayahan dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor infrastruktur dan kewilayahan

Realisasi Fisik Kegiatan sampai 31 Desember 2019 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp 409.866.484,- atau 98,05.

Permasalahan kegiatan yaitu tidak ditemui permasalahan mendasar selama pelaksanaan kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan mencapai 100%.

#### **11) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 327.035.400,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat serta Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melakukan rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (APBD, DAK dan APBN);
- b) Melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan ke Kabupaten/Kota;
- c) Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi dengan Pusat.
- d) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

- e) Melaksanakan fasilitasi RKPD Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 Kabupaten/Kota;

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya Rapat Pengendalian capaian kinerja program/ kegiatan APBD Provinsi Sumatera Barat (T1, T2, T3, T4) sebanyak 4 kali;
- b) Rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 75 kali;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d) Monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota sebanyak 19 kab/kota;
- e) Koordinasi pengendalian dan evaluasi ke pusat;
- f) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Target Kinerja :

- a) Terlaksananya Rapat Pengendalian capaian kinerja program/ kegiatan APBD Provinsi Sumatera Barat (T1, T2, T3, T4) sebanyak 4 kali.
- b) Terlaksananya rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 75 kali;
- c) Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d) Terlaksananya Monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota sebanyak kab/kota;
- e) Terlaksananya Koordinasi pengendalian dan evaluasi ke pusat;
- f) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Realisasi Target dan Anggaran: Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 319.291.719,- atau sebesar 97,63%.

## **12) Kegiatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat,**

Dengan pagu dana sebesar Rp.429.816.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kelembagaan PUG Provinsi Sumatera Barat dan pada Pemerintah daerah Kabupaten/kota
- b) Terfasilitasinya penyusunan PPRG SKPD Provinsi Tahun 2020
- c) Tersosialisasinya dengan baik Pengarusutamaan Gender pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama pelaksanaan PPRG
- d) Ditetapkannya RANDA PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota
- e) Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan RANDA PUG Bagi Pemerintah Kabupaten / Kota

Jenis Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kelembagaan PUG
- b) Pelaksanaan review/verifikasi PPRG pada usulan OPD Tahun 2020
- c) Monev Pelaksanaan PUG dan PPRG di Kabupaten/Kota
- d) Penyusunan dan penetapan RANDA PUG bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota
- e) Pelaksanaan dan Pemantauan RANDA PUG

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat
- b) Terverifikasinya Dokumen GAP dan GBS SKPD Tahun 2020
- c) Verifikasi Laporan RANDA PUG Kabupaten/Kota
- d) Pembinaan dan Pemantauan RANDA PUG Kabupaten/Kota

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya capaian IPG dan IDG. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.391.391.922,- atau 91,06%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Masih minimnya pemahaman SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan konsep PUG dan pelaksanaan PPRG
- b) PUG baru dipahami sebatas pemisahan antara laki-laki dan perempuan
- c) PUG belum menjadi prioritas konsep pembangunan
- d) Masih lemahnya peran SKPD Pemberdayaan Perempuan ditingkat Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
- e) Belum optimalnya peran Tim Penggerak PPRG dalam melaksanakan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- f) Pelaksanaan RANDA PUG baru sebatas output belum kepada outcome

Solusi antara lain :

- a) Meningkatkan koordinasi PUG di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b) Sosialisasi konsep PUG pada setiap proses perencanaan dan penganggaran
- c) Peningkatan kapasitas anggota Tim Penggerak PPRG dan Focal Point di masing-masing SKPD

- d) Pemanfaatan Sistem Pemantauan Kantor Staf Presiden dalam pemantauan PUG di Kabupaten/Kota
- e) Pembinaan secara intensif kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PUG

**13) Kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia,**

Dengan pagu dana sebesar Rp.108.229.100,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program kegiatan pada lingkup perencanaan sub bidang sumber daya manusia.
- b) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam program kegiatan pada lingkup perencanaan sub bidang sumber daya manusia melalui keterpaduan dari berbagai SKPD dan lintas sektor serta Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsinya dan kewenangan masing-masing.
- c) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat

Jenis Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi Lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia

- a) Penyusunan Aplikasi Swastisaba
- b) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
- c) Pelatihan Kabupaten/Kota Sehat
- d) Mengikuti rapat-rapat koordinasi di Pusat dan Kabupaten/Kota terkait dengan perencanaan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Percepatan sasaran pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia, dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pengumpulan dan dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan sub bidang sumber daya manusia.
- b) Tersusunnya Laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan rapat-rapat, dan hasil pertemuan (Notulen dan laporan perjalanan dinas) dari Kegiatan Akselerasi Pencapaian sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2019.

- c) Tersusunnya Aplikasi Swastisaba dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat.
- d) Terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia. Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.103.053.530,- atau sebesar 95,22%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Isu pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia bersifat lintas sektor sehingga masih terdapat beberapa kesulitan dalam melaksanakan koordinasi
- b) Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat selama ini masih berorientasi pada output yakni baru sebatas mendapatkan penghargaan Swastisaba sehingga outcome kegiatan masih belum terlalu nampak

Solusi antara lain :

- a) Pemanfaatan secara maksimal aplikasi swastisaba dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- b) Koordinasi yang intens dengan para SKPD pemangku kepentingan melalui rapat-rapat koordinasi
- c) Pembinaan ke Kabupaten/Kota secara kontinue dan intensif baik dalam bentuk rapat/pertemuan maupun pemantauan langsung kelapangan.

#### **14) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sumatera Barat**

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia, dengan pagu awal dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp.92.198.400,- dengan output terlaksananya perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Provinsi Sumatera Barat. Realisasi fisik Kegiatan sampai keadaan 31 Desember 2019 adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp. 86.975.345,- atau 94,33%

#### **15) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan**

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia, dengan pagu awal dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp.111.699.800,- dengan output kegiatan :

- a) Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi percepatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan perikanan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan Sinergitas Program sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan dan komoditi unggulan
- b) Tersedianya data dan informasi tentang percepatan pembangunan sektor Pertanian dan Perikanan.

Realisasi Fisik Kegiatan sampai keadaan 20 Desember 2019 adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp109.339.386 atau 97,89 % .

#### **16) Kegiatan Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.119.615,- tujuan dari kegiatan ini adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah tahun 2019; dan Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing bidang urusan pemerintahan tahun 2019.

Pelaksanaan Kegiatan, dalam bentuk:

- a) Rapat persiapan Rakortek Pemerintah Provinsi dengan SKPD dan Kabupaten/Kota;
- b) Rapat koordinasi teknis antara Pemerintah Pusat/ Kementerian dan Lembaga dengan Pemerintah Daerah untuk pembahasan usulan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- c) Rapat Koordinasi Teknis Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian hasil Rakortek Pusat kepada seluruh SKPD dan Kab/Kota.

Keluaran kegiatan antara lain

- a) Terlaksananya rapat teknis persiapan Rakortek.
- b) Terlaksananya Rakortek Tingkat Provinsi.
- c) Terlaksananya Rakortek Tingkat Pusat.

Hasil yang diharapkan adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan daerah tahun 2020.

Realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 267.737.795,- atau 99,12%.

**17) Kegiatan Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL),**

Dengan pagu dana sebesar Rp.154.511.600,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatnya kapasitas Anggota Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b) Meningkatnya koordinasi antara Pokja AMPL Nasional, Pokja AMPL Provinsi dan Pokja AMPL Kabupaten/Kota
- c) Terfasilitasinya pelaksanaan Program AMPL di Provinsi Sumatera Barat
- d) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Replikasi Manajemen Pengelolaan Data AMPL bagi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Pasaman, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kota Solok, Bukittinggi dan Pariaman
- e) Terlaksananya advokasi Replikasi Manajemen Pengelolaan Data AMPL bagi Kabupaten/Kota lainnya
- f) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan perencanaan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas III) pada 12 Kabupaten di Sumatera Barat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) TOT pelaksanaan SABRT bagi Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan SABRT dan juga yang telah melaksanakan SABRT
- b) Monitoring dan evaluasi kelembagaan Pokja AMPL dan program/kegiatan pembangunan AMPL di Kabupaten/Kota
- c) Fasilitasi dan pendampingan serta pemantauan Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Data AMPL pada Kabupaten/Kota peserta
- d) Fasilitasi pelaksanaan program AMPL di Sumatera Barat
- e) Rapat Tim Koordinasi Provinsi Program Pamsimas antara anggota Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Konsultan, Satker dan Kabupaten pelaksana Program Pamsimas III
- f) Pemantauan pelaksanaan Program Pamsimas III pada 12 kabupaten di Sumatera Barat

- g) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Program Pamsimas III pada 12 Kabupaten dan Persiapan Program Pamsimas III Tahun 2018 pada 12 Kabupaten

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan data di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dan advokasi kepada Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat
- b) Meningkatnya kapasitas Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c) Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Program Pamsimas III pada 12 kabupaten di Sumatera Barat
- d) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan pelaksanaan program PAMSIMAS III di Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Makin berfungsinya kelembagaan Pokja AMPL di Kabupaten/Kota serta terfasilitasinya Program AMPL di Sumatera Barat khususnya pelaksanaan manajemen pengelolaan data AMPL dan Program Pamsimas III pada 12 Kabupaten
- b) Makin berfungsinya peran Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS III pada 12 Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
- c) Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.153.651.982,- atau 99,44%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Kegiatan ini merupakan kegiatan yang saling terkait antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b) Pelaksanaan kegiatan dari Pusat terlambat dimulai yakni pada bulan Oktober 2019 sehingga menyebabkan seluruh proses dalam pelaksanaan SABRT tidak berjalan maksimal
- c) Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan program PAMSIMAS.

Solusi antara lain :

- a) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b) Membangun komitmen semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SABRT sehingga kendala dan permasalahan kedepan dapat dieliminasi
- c) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan PAMSIMAS

**18) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air**

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia, dengan pagu awal dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp.58.901.600,- dengan output kegiatan terlaksana dukungan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Komisi Irigasi, Dewan Sumber Daya Air, TKPSDA, dll) dan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP). Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan PerkuatanKelembagaan Sumber Daya Air. Realisasi Fisik Kegiatan sampai dengan Desember 2019 adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp58.164.190atau98,75%.

**19) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha**

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia sebesar Rp.104.899.900,- dengan output kegiatan yaitu :

- a) Tercapainya percepatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha di Sumatera Barat
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi daerah berikutnya.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan : Terjadinya peningkatan percepatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha di Sumatera Barat dan Tersedianya data dan informasi tentang rpercepatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha.

Realisasi fisik kegiatan adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp. 103.373.509,-atau 98,54 % .

**20) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.788.100,- keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota. Hasil dari kegiatan ini adalah Sinergitas dan integrasi pelaksanaan koordinasi perencanaan

penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.206.613 atau 99,10%.

**21) Kegiatan Harminisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.477.600,- tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Mengevaluasi perkembangan program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang sudah diakomodir pada APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Sinkronisasi Program / Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c) Membahas usulan, permasalahan dan solusi.

Pelaksanaan Kegiatan, dalam bentuk:

- a) Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Melaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se Sumatera Barat.

Keluaran Kegiatan : Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan dengan hasil :

- a) Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pendanaan program dan kegiatan;
- b) Terlaksananya rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikot se Sumatera Barat.

Realisasi : Realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.836.576,- atau 97,09%

**22) Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.283.396,- keluaran dari kegiatan adalah tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan PDT. Realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% dan realisasikeuangan Rp. 69.990.390,- atau 94.22%. Hasil pelaksanaan adalah terlaksananya koordinasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal.

**23) Kegiatan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan**

Dengan pagu dana sebesar Rp.508.573.300,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan antara Pemerintah Pusat, SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

- b) Terlaksananya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan perencanaan program kegiatan pembangunan melalui keterpaduan lintas sector lingkup bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi Lingkup Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kabupaten/Kota dan menghadiri undangan rapat dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga).
- b) Verifikasi/Pembahasan Renja SKPD, Musrenbang dan KUA PPAS.
- c) Mengikuti agenda pembahasan penyusunan perencanaan dan penganggaran baik ditingkat Pusat dan Provinsi.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi.
- b) Tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- c) Terlaksananya pembahasan/verifikasi Renja SKPD, Musrenbang dan KUA PPAS.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Terfasilitasinya permasalahan perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan baik lintas program, lintas SKPD Provinsi maupun kabupaten/kota.
- b) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang sosial budaya dan pemerintahan melalui rapat-rapat koordinasi lintas SKPD dan lintas sector, serta pertemuan-pertemuan ditingkat Provinsi, Kabupaten Kota dan Pusat.
- c) Terwujudnya Dokumen hasil pembahasan lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang saling bersinergi lintas sector dan program, dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial serta Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.495.500.556,- atau sebesar 97,43%.

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Penyusunan perencanaan belum sepenuhnya mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b) Masih minimnya pemahaman SKPD dalam penyusunan perencanaan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan
- c) Masih adanya ego sektoral dalam penyusunan perencanaan.
- d) Perencanaan belum sepenuhnya disusun berdasarkan prioritas, serta saling bersinergi antara SKPD yang satu dengan yang lainnya.

Solusi antara lain :

- a) Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah
- b) Penyusunan Prioritas pada masing-masing SKPD perlu mempertimbangkan hasil cascading yang telah disusun

#### **24) Kegiatan Akselerasi dan Harmonisasi Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia Rp164.749.050,- dengan output kegiatan yaitu :

- a) Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang sinkron
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan SDA, Tata Ruang dan lingkungan hidup dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pembangunan SDA, Tata Ruang dan lingkungan hidup.

- b) Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2019 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp 163.081.578, -atau 98,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.667.472,-

Permasalahan kegiatan yaitu belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup.

Tindak lanjut kegiatan yaitu:

- a) Tahun 2020 kegiatan dilanjutkan dengan nama kegiatan yang sama
- b) Peran stake holders akan lebih dioptimalkan dalam koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup

## **25) Kegiatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat,**

Dengan pagu dana sebesar Rp.285.732.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat
- b) Meningkatnya peran serta (pemberdayaan) masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Pengembangan Aplikasi Swastisaba
- b) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
- c) Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat
- d) Fasilitasi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Pengembangan Aplikasi Swastisaba dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat.
- b) Terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.278.404.590,- atau sebesar 97,44%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat selama ini masih berorientasi pada output yakni baru sebatas mendapatkan penghargaan Swastisaba sehingga outcome kegiatan masih belum terlalu nampak
- b) Masih rendahnya komitmen Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan Aplikasi Swastisaba

- c) Belum sinerginya antara Forum Kabupaten/Kota Sehat dengan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat
- d) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Kabupaten Kota Sehat

Solusi antara lain :

- a) Pemanfaatan secara maksimal aplikasi swastisaba dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- b) Koordinasi yang intens dengan para SKPD pemangku kepentingan melalui rapat-rapat koordinasi
- c) Pembinaan ke Kabupaten/Kota secara kontinue dan intensif baik dalam bentuk rapat/pertemuan maupun pemantauan langsung kelapangan.

#### **26) Kegiatan Harmonisasi Pelaksanaan Pangan dan Gizi Tahun 2019**

Dengan pagu dana sebesar Rp. 76.001.000,- keluaran kegiatan adalah :

- a) Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
- b) Terlaksananya FGD
- c) Terlaksananya Workshop
- d) Terlaksananya penyusunan laporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Hasil kegiatan adalah : Buku Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi untuk menunjang pembangunan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 72.326.624,- atau 95,17%

#### **27) Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah,**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.907.700,-. kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Membentuk Tim Penulis dari Perguruan Tinggi dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- b) Melakukan rapat-rapat dengan Tim Penulis tentang kebutuhan datadan kemajuan tulisan;
- c) Melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah(OPD) lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d) Melakukan pengumpulan data, berdasarkan kebutuhan tim penulis;
- e) Melaksanakan Focuss Group Discussion (FGD) dengan OPD Provinsi;

f) Mengikuti FGD EKPD ke Pusat;

Keluaran dari kegiatan ini adalah Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebanyak 100 buku. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 145.830.268,- atau sebesar 99,27%.

## **28) Kegiatan Akselerasi Capaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya**

Dengan pagu dana sebesar Rp.110.000.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Terlaksananya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program kegiatan pada lingkup perencanaan sub bidang Sosialbudaya.
- b) Terlaksananya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada sub bidang sosial budaya.
- c) Terfasilitasinya serta terkoordinasinya pelaksanaan program prioritas nasional antara lain Percepatan Penurunan Stunting (Anak Kerdil) di Sumatera Barat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi pada Sub Bidang Sosial Budaya, Kabupaten/kota dan Pemerintah pusat.
- b) Pengumpulan data dan informasi ke Kabupaten/kota.
- c) Rapat Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung Program prioritas nasional
- d) Menghadiri pertemuan-pertemuan di tingkat Nasional terkait dengan isu-isu pembangunan lingkup Sub Bidang SDM

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi (Pemerintah Pusat) serta pengumpulan data data dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan sub bidang sosial budaya.
- b) Tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya Tahun 2019.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan pusat provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan pada sub bidang sosial budaya.
- b) Terfasilitasinya program Prioritas Nasional di daerah
- c) Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.162.237.198,- atau sebesar 97,61%.

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Belum sepenuhnya SKPD lingkup Sosial Budaya mempedomani pencapaian sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi I
- b) Belum seluruhnya SKPD baik di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengetahui dan memahami dengan baik program Prioritas Nasional
- c) Solusi antara lain : Perlu koordinasi yang intens dengan SKPD lingkup Sosial budaya dalam pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi I dan pada pelaksanaan program prioritas nasional.

## **29) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**

Dengan pagu dana sebesar Rp 53.376.350,- output kegiatan yaitu :

- a) Terciptanya Korodinasi RAD Penurunan Emisi gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas RumahKaca (GRK)
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya

Hasil dari pelaksanaan kegiatan : Meningkatnya kualitas dokumen RAD GRK Provinsi Sumatera Barat. Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2019 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.51.917.481 atau 97,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.458.869,-

Permasalahan kegiatan yaitu belum optimalnya dalam penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca oleh stakeholders.

Tindak lanjut kegiatan yaitu:

- a) Tahun 2020 kegiatan dilanjutkan dengan nama kegiatan yang sama

- b) Peran stake holders akan lebih dioptimalkan dalam penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca

### **30) Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 276.762.000,- output kegiatan ini adalah tersedianya rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021. Realisasi fisik kegiatan sebesar 15%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.997.100 atau 14,45%. Kegiatan ini tidak dilanjutkan sehubungan dengan tindak lanjut Surat Dirjen Bina Bangsa KEMENDAGRI Nomor : 050/6221/Bangda Tanggal 2 Desember 2019 tentang Revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mengingat prinsip efektif dan efisien Perubahan RPJMD Sumatera Barat disarankan untuk tidak melakukan Perubahan RPJMD mengingat waktu berakhirnya RPJMD kurang dari 3 Tahun dan proses pelaksanaan Penyusunan Perubahan RPJMD berlaku mutatis mutandis. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah mengenai pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dijelaskan melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan.

#### **2.1.1. Perkiraan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2020 dan Capaian Target Renstra 2016-2021**

Untuk pencapaian target sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis di Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 8 Program, yang terdiri dari 5 Program Non Urusan dengan 26 kegiatan dan 3 Program Urusan dengan 39 kegiatan. Jadi total kegiatan ada sebanyak 65 kegiatan sesuai dengan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.446.925.651,-.

Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan seperti pada lampiran I (Table T-C.29).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bappeda mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan yang mejadi kewenangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda, sesuai dengan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka dalam rencana kerja tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis badan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Berdasarkan realisasi capaian target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, maka telah menunjukan hasil yang sangat baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tabel pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2020 sebagaimana berikut :

Tabel 2. 2  
Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	1 Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan	100%	100%	100
2	Meningkatkan tata kelola organisasi	2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
		3 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	95%	96.30%	101.36

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja kinerja OPD adalah :

- Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan) sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1  
Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN</b>	210.624.628	205.560.003	97,60	100
1	Pengelolaan website www.bappeda.sumbarprov.go.id	49.960.000	49.583.127	99,25	100
2	Pengelolaan data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan	8.188.400	8.180.805	99,91	100
3	Forum data perencanaan pembangunan provinsi Sumatera Barat	152.476.228	147.796.071	96,93	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.278.368.923,00</b>	<b>1.257.928.047,00</b>	<b>98,40</b>	<b>100</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.926.600,00	19.520.661,00	97,96	100
2	Penyusunan KUA/PPAS APBD	209.096.600,00	209.074.483,00	99,99	100
3	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	571.325.274,00	559.080.501,00	97,86	100
4	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	17.629.749,00	16.381.532,00	92,92	100
5	Penyusunan RKPD	283.522.450,00	282.689.386,00	99,71	100
6	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi perencanaan Pembangunan Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	100	100
7	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	4.788.800,00	4.699.050,00	98,13	100
8	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	141.079.450,00	135.482.434,00	96,03	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.552.773.808,00</b>	<b>5.383.941.015,00</b>	<b>96,96</b>	<b>97,07</b>
1	Kerjasama Ekonomi Regional Dan Internasional	374.116.579,00	359.936.149,00	96,21	100
2	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	18.315.126,00	16.916.337,00	92,36	100
3	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	42.975.917,00	27.543.863,00	64,09	100
4	Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	2.336.283.000,00	2.318.879.526,00	99,26	100
5	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	20.314.282,00	20.314.282,00	100	100
6	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	77.744.830,00	68.715.161,00	88,39	100
7	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	14.298.400,00	14.198.866,00	99,30	100
8	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	170.646.701,00	170.634.991,00	99,99	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
9	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	126.562.528,00	125.426.508,00	99,10	100
10	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	25.801.721,00	25.288.161,00	98,01	100
11	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	14.629.450,00	14.629.450,00	99,67	100
12	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	128.535.600,00	127.188.203,00	98,95	100
13	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15.350.956,00	15.346.995,00	99,97	100
14	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	142.712.450,00	141.770.945,00	99,34	100
15	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	41.183.200,00	36.507.790,00	88,65	100
16	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	13.334.400,00	13.004.555,00	97,53	100
17	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	512.508.200,00	503.263.238,00	98,20	100
18	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	54.635.950,00	54.301.706,00	97,39	100
19	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	54.090.368,00	53.418.413,00	98,76	100
20	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	40.556.500,00	40.480.141,00	99,81	100
21	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	45.772.000,00	45.513.750,00	99,44	100
22	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	51.013.926,00	48.603.264,00	95,27	100
23	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	43.631.451,00	41.311.985,00	94,68	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
24	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	341.428.756,00	335.877.198,00	98,37	100
25	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat	232.188.294,00	231.293.688,00	99,61	100
26	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	76.206.805,00	76.146.433,00	99,62	100
27	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	1.944.261,00	1.944.261,00	100	100
28	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	172.943.257,00	101.497.467,00	58,69	100
29	Tata Kelola Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	363.048.900,00	354.036.201,00	97,52	100
	<b>TOTAL</b>	<b>8.512.819.307</b>	<b>7.967.703.007</b>	<b>95,46</b>	<b>100</b>

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda tahun 2020 pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

1. Harmonisasi Program/ Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jumlah anggaran Rp 42.975.917,00 terealisasi sebesar Rp 27.543.863,00 atau 64,09 %. Hal ini karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tidak terlaksana secara maksimal, dimana dari jumlah peserta yang diminta yaitu OPD provinsi dan kabupaten kota hanya 5 % yang menyanggupi dan mengirimkan nama usulan.
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; jumlah anggaran Rp 42.975.917,00 terealisasi sebesar Rp 27.543.863. Karena adanya pandemi Covid 19, penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020 sedikit mengalami kendala sehingga waktu pelaksanaan penyusunan buku EKPD kurang dari lima bulan. Sesuai ketentuan pembayaran belanja jasa tenaga ahli sebagai tim penulis adalah 80 % dari standar harga yang berlaku. Terdapat sisa anggaran pada rekening belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.

3. Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman; jumlah anggaran Rp 41.183.200,00 terealisasi sebesar Rp 36.507.790,00 atau 88,65 %. Sisa anggaran adalah belanja perjalanan dinas yang memang tidak bisa dimanfaatkan.
4. Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; jumlah anggaran Rp 172.943.257,00, terealisasi sebesar Rp 101.497.467,00 atau 58,69 %. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan jadwal yang diberikan oleh DPRD. Jadwal semula Revisi RPJPD akan ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2020 namun kemudian diputuskan bahwa Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2025 tidak ditetapkan di tahun 2020, sehingga sisa anggaran adalah pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja cetak.

➤ Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) seperti pada berikut :

Tabel 2.4  
Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2  
Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>3.027.134.125,00</b>	<b>2.976.925.768,80</b>	<b>99,45</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.980.000,00	39.980.000,00	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	919.000.000,00	893.081.646,00	97,18	100
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	69.295.000,00	69.011.327,00	99,59	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	902.370.000,00	883.791.766,80	97,94	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.681.583,00	48.669.796,00	99,98	100
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.951.284,00	35.891.034,00	99,83	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.930.545,00	5.924.145,00	99,89	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	32.040.000,00	32.004.000,00	99,89	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	49.952.000,00	99,90	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	820.140.753,00	815.498.694,00	99,43	100
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	103.744.960,00	103.121.360	99,40	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>636.951.314,00</b>	<b>634.512.689,00</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.563.750,00	112.534.323,00	99,97	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	180.000.000,00	179.905.580,00	98,04	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	83.102.364,00	81.474.886,00	98,04	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	32.500.000,00	32.415.000,00	99,74	100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	19.885.200,00	19.769.000,00	99,42	100
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	13.000.000,00	12.995.400,00	99,96	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	30.000.000,00	29.918.500,00	99,73	100
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	165.900.000,00	165.500.000,00	99,76	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.498.200,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	67.500.000,00	67.498.200,00	99,99	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>92,21</b>	<b>100</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.220.000,00	1.125.000,00	92,21	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>401.063.083,00</b>	<b>395.122.507,00</b>	<b>98,52</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.444.050,00	62.910.577,00	96,13	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	254.000.000,00	252.050.000,00	99,23	100
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	38.659.033,00	37.201.930,00	96,23	100
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	42.960.000,00	42.960.000,00	100	100
	<b>TOTAL</b>	<b>9.114.067.008</b>	<b>3.578.704.194</b>	<b>97,36</b>	<b>100</b>

Dari tabel 2.4 terlihat serapan anggaran untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu dengan realisasi sebesar 97.36% dan fisik sebesar 100%.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum dipedomaninya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
7. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
9. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perencana;
10. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
11. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;

12. Belum dipedomaninya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
13. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
14. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannyasebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
15. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
16. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumbar selama kurun waktu lima tahun ke belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu :

Tabel 2.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber daya aparatur	41.2% aparatur memiliki kualifikasi pendidikan wsws menengah dan 58.8% aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1	Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi	Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi	Koordinasi dan konsolidasi internal Bappeda yang perlu ditingkatkan
Sistem dan tata kerja lembaga	Hampir semua system dan tata kerja sudah memiliki <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> namun belum sepenuhnya diimplementasikan	Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap aparatur yang menerapkan SOP secara baik dan benar	Adanya kebijakan Pemerintah terkait Revolusi Mental yang diejawantahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah	Perlunya peningkatan system dan tatakerja lembaga yang lebih efektif dan efisien

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Koordinasi, komitmen, dan tanggung jawab internal maupun antar PD	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar PD	Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap PD yang tidak berkoordinasi dengan Bappeda dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan	PD yang cenderung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan
Pengelolaan data dan informasi perencanaan	Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan belum maksimal sebagai masukan bagi analisis pembangunan dan penelitian	Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung untuk mengelola data dan informasi pembangunan	Tuntutan perkembangan zaman memaksa pola pengelolaan data dan informasi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi	Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan
Pelayanan publik	Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal dalam rangka diseminasi informasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya aparatur yang profesional dan inovatif	Tuntutan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi	Peningkatan kinerja lembaga dalam aspek layanan publik

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Bappeda. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Bappeda harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Bappeda.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program dan kegiatan, namun terdapat beberapa jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda. Hal ini sejalan dengan hasil reuiu APIP terhadap Rancangan RKPD dimana rencana program dan pagu anggaran Bappeda belum seluruhnya konsisten antara RPJMD dengan RKPD, dimana masih ditemui Program memiliki pagu dana dalam RPJMD tapi tidak tersedia dananya pada RKPD.

Hasil analisa kebutuhan pagu anggaran tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada lampiran II Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, diperlukan untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang timbul saat pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2021.

Permasalahan-permasalahan yang timbul sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Di Indonesia, penanganan terhadap Pandemi Covid-19 telah coba dikendalikan pada masa-masa awal penyebarannya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hampir seluruh wilayah Provinsi di Indonesia. Di Sumatera Barat, hingga akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, pengendalian Pandemi Covid-19 dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan pada semua aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, dan juga telah mulai dibukanya kembali mobilitas dan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dalam hal ini usulan yang berupa program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat tidak ditemui pada program dan kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, tetapi ada beberapa usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 yang berasal dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dan HWDI Sumatera Barat yang bisa dijadikan masukan guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam mengkoordinir terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas baik secara proses maupun hasil. Usulan tersebut antara lain :

1. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) mengharapkan agar mengaktifkan dan memperkuat Pokja AMPL/PPAS.

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Bappeda sebagai koordinator akan memfasilitasi AMPL dan Sanitasi pada OPD teknis yang akan menjalankan AMPL dan Sanitasi diantaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkimtan.
2. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) menyarankan perlunya dibangun sinergi dan kolaborasi antar pihak, termasuk antar OPD terkait serta keterlibatan PKK dan organisasi perempuan lainnya dalam upaya meningkatkan akses sanitasi.

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Bappeda sebagai koordinator akan memfasilitasi AMPL dan Sanitasi pada OPD teknis yang akan menjalankan AMPL dan Sanitasi diantaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkimtan sehingga bisa dibangun sinergi dan kolaborasi antar pihak, termasuk antar OPD terkait serta keterlibatan PKK dan organisasi perempuan lainnya dalam upaya meningkatkan akses sanitasi.
3. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) mengharapkan diadakannya Musrenbang khusus perempuan dan anak dengan tujuan agar kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak terakomodir dengan baik.

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Bappeda akan meningkatkan pelaksanaan Musrenbang yang mampu mengakomodir semua pihak khususnya kelompok termarginalkan.
4. HWDI Sumatera Barat mewakili organisasi penyandang difabel menyarankan agar dimasukkan kata-kata inklusif untuk penyandang difabel dalam dokumen perencanaan dengan harapan agar negara memberikan kesamaan, kesempatan dan kesetaraan bagi disabilitas sesuai maksud UU 8/2016.

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Kedepan dalam penyusunan dokumen RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda akan diperhatikan beberapa aspek yang selama ini belum terakomodir dalam dokumen perencanaan, termasuk salah satunya aspek disabilitas.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan Visi :

**”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Disamping mencapai Tujuan Utama, sebagai Strategi dalam melaksanakan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima Arahannya, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :
  - a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
  - b. Peningkatan Produktifitas SDM.
  - c. Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni :
  - a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
  - b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
  - c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
  - d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
  - e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
  - a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.
  - b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.

4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
  - a. Penyederhanaan Prosedur
  - b. Penyelenggaraan e-Government
  - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
  - a. Industrialisasi
  - b. Pengembangan Destinasi Unggulan
  - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Ada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional untuk Periode RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Sumatera Barat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada prioritas pembangunan nasional. Rumusan kebijakan tersebut perlu dilakukan melalui telaahan terhadap prioritas nasional dalam RKP Tahun 2022.

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021 dan dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021, maka Tema pembangunan RKP 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tetap diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal pada 2022, maka kata kunci dalam RKP pada 2022 diarahkan pada empat hal, yaitu Kemiskinan, Lapangan Kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta Industri.

Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4–6,0 persen secara *year on year*. Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19, Tahun 2022 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi

Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 juga akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional dengan 10 *Major Project* yang berkaitan langsung dengan Tema RKP 2022, yaitu :

1. Transformasi Digital,
2. Peningkatan Peran UMKM,
3. Kawasan Industri dan 31 *Smelter*,
4. Pengembangan 10 Destinasi Wisata,
5. *Food Estate*,
6. Energi Terbarukan,
7. *Major Project* di Wilayah Papua,
8. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu,
9. Sistem Kesehatan Nasional, dan
10. Ibu Kota Negara.

Pemerintah Daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk menyusun prioritas pembangunan dan memecahkan isu strategis yang dihadapi, harus memperkuat sinergi lintas sumber pembiayaan, baik Dana Perimbangan dan program prioritas dari kementerian/lembaga guna mendukung prioritas pembangunan,

**Tabel 3.1**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022**

Indikator Pembangunan	Target 2024 pada RPJMN 2020-2024	Target 2022		
		Nasional	Pulau Sumatera	Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,5	4,5-5,5	3,9 – 5,1	3,40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,6 - 4,3	7,5-8,2	7,2	6,60
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,2	9,2-9,7	9,6	6,28

Sumber Data : Olahan Bappenas dengan mempertimbangkan pemulihan akibat pandemic Covid-19

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

#### A. Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 secara umum ditujukan untuk :

1. Menjadi acuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022.
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menilai implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan operasional Tahun 2022.

Secara khusus berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di bidang perencanaan pembangunan, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang telah dirumuskan di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yaitu :  
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”,

## **B. Sasaran**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
4. Penggunaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan
5. Meningkatnya pengelolaan organisasi

Sasaran tersebut dalam rangka mewujudkan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di tahun I (kesatu) pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.

2. Meningkatnya tata kelola organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang sedang dalam tahap akhir penyusunan, maka dapat digambarkan target tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022**

<b>Renja Tahun 2022</b>		
<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target</b>
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	28,84
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rencana Program tersebut terdiri atas 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan potret rencana program pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Rencana program tersebut didukung oleh 14 kegiatan dan 77 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 39.812.061.830,- sebagaimana terlihat pada tabel T-C.27 yang terlampir sebagai lampiran III dalam dokumen ini.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

**4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Sasaran dari pogram ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.  
Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi.
- 3) Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>		
<b>PENUNJANG URUSAN</b>		
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
	14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>		
	25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	30	Pengadaan Mebel
	31	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PERENCANAAN</b>		
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	40	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	41	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	42	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	43	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
	44	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
	45	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	46	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	47	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
	48	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>		
	49	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	50	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
	51	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
	52	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	53	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
C.	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>		
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
XIV		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	70	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	71	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	72	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	73	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	74	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	75	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	76	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	77	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tahun 2021, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 3 Program, 14 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan.

#### **4.2 Pendanaan**

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dan APBN Tahun Anggaran 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Bappeda Tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan dalam kerangka penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Bappeda. Diharapkan semua aparatur dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tergambar dalam laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

#### 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan.
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

## 5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

**LAMPIRAN I**  
**TABEL T-C.29**  
**Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2020**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket			
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>																														
<b>NON URUSAN</b>																														
					78.224.844.402	40.649.830.690	11.580.292.115	1.746.721.523	2.107.092.691	2.104.934.747	4.963.863.998	10.922.612.959	89,50	94,32	51.572.443.649	137,82	65,93													
					29.844.795.162	20.669.504.971	4.348.175.180	616.411.552	866.763.624	938.450.237	1.653.558.751	4.075.184.164	78,99	93,72	24.744.689.135	124,60	82,91													
3.00.02.011		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	300,00	17.466.805.621	400,00	13.540.815.449	100,00	3.390.522.783	25,00	506.669.759	25,00	523.013.074	25,00	769.099.408	25,00	1.178.143.527	100,00	2.976.925.768	100,00	87,80	500,00	16.517.741.217	166,67	94,57				
1	3.00.02.011.1	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Tersedianya jasa Petugas dan peralatan Kebersihan Kantor - Tersedianya jasa Sopir Kantor - Tersedianya jasa Petugas dan peralatan keamanan Kantor	bulan	300,00	3.746.951.963	100,00	2.791.323.342	12,00	902.370.000	3,00	61.021.343	3,00	346.321.454	3,00	209.032.279	3,00	267.416.690	12,00	883.791.766	100,00	97,94	112,00	3.675.114.108	37,33	98,08	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
2	3.00.02.011.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos materi 6000 dan 3000, pengiriman surat dan Honor Pegawai PTT	bulan	72,00	292.226.000	48,00	151.006.540	12,00	39.980.000	3,00	9.240.000	3,00	8.670.000	3,00	11.110.000	3,00	10.960.000	12,00	39.980.000	100,00	100,00	60,00	190.986.540	83,33	65,36	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
3	3.00.02.011.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terkelaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, kawat, faksimili, internet serta lisensi zoom meeting	bulan	72,00	6.115.900.226	48,00	3.664.476.706	12,00	919.000.000	3,00	186.983.728	3,00	86.337.484	3,00	225.245.940	3,00	394.514.494	12,00	893.081.646	100,00	97,18	60,00	4.557.558.352	83,33	74,52	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
4	3.00.02.011.4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terkelaksananya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor	unit	60,00	422.177.000	39,00	205.076.043	11,00	69.295.000	4,00	25.923.727	5,00	10.683.775	0,00	0	2,00	32.403.825	11,00	69.011.327	100,00	99,59	50,00	274.087.370	83,33	64,92	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
5	3.00.02.011.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	72,00	464.227.741	48,00	279.022.028	12,00	48.681.583	3,00	13.028.103	3,00	0	3,00	16.268.803	3,00	19.372.890	12,00	48.669.796	100,00	99,98	60,00	327.691.824	83,33	70,59	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
6	3.00.02.011.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terkelaksananya pencetakan dan penggandaan	bulan	72,00	520.637.116	48,00	267.169.421	12,00	35.951.284	3,00	12.447.298	3,00	5.720.440	3,00	7.008.733	3,00	10.714.563	12,00	35.891.034	100,00	99,83	60,00	303.060.455	83,33	58,21	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
7	3.00.02.011.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	bulan	72,00	300.887.181	48,00	147.546.431	12,00	11.480.545	0,00	0	0,00	0	9,00	4.427.280	3,00	1.496.865	12,00	5.924.145	100,00	51,60	60,00	153.470.576	83,33	51,01	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumbar		
8	3.00.02.011.8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku-buku	jenis koran	3,00	306.926.290	1,00	140.085.820	6,00	26.490.000	0,00	11.367.500	6,00	7.987.500	0,00	5.916.500	0,00	6.732.500	6,00	32.004.000	100,00	120,82	7,00	172.089.820	233,33	56,07	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
			majalah dan buku-buku	9,00		6,00	2,00		0,00		1,00		0,00						2,00				8,00							
9	3.00.02.011.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	rapat/pertemuan yang diselenggarakan	kali	16,00	258.775.930	12,00	124.516.000	4,00	50.000.000	8,00	2.815.000	6,00	12.961.000	12,00	11.894.000	14,00	22.282.000	40,00	49.952.000	100,00	99,90	52,00	174.468.000	325,00	67,42	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
				bulan				12,00											12,00				12,00							
10	3.00.02.011.10	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	terlaksananya wirid - terlaksananya kegiatan senam	bulan		594.900.000		286.665.200	12,00	117.386.250		3.800.000		3.550.000		34.547.915		12,00		103.121.360	100,00	87,85	12,00	389.786.560	#DIV/0!	65,52	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
11	3.00.02.011.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	kali dalam daerah	475,00	4.443.196.174	375,00	5.483.928.918	80,00	1.169.888.121	0,00	180.043.060	25,00	40.781.421	20,00	243.647.958	15,00	351.026.255	60,00	815.498.694	75,00	69,71	435,00	6.299.427.612	91,58	141,78	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
				kali luar daerah	350,00		216,00	70,00			0,00		8,00		10,00				28,00				40,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								#DIV/0!	73,95					
Predikat Kinerja																								#DIV/0!	S					
3.00.02.012		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keberfungsian sarana dan prasarana aparatur	%	300,00	5.832.172.161	400,00	4.019.236.569	100,00	471.051.314	25,00	21.267.819	25,00	174.513.450	25,00	72.612.371	25,00	366.119.049	100,00	634.512.689	100,00	134,70	500,00	4.653.749.258	166,67	79,79				
			Keputuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau=3; kuning=2; merah=1)	zona	9,00		9,00		3,00		0,00		0,00		0,00				3,00				100,00	12,00						
1	3.00.02.012.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas jaban/operasional roda empat	unit	13,00	1.800.000.000	6,00	1.994.920.000	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	6,00	1.994.920.000	46,15	110,83	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
2	3.00.02.012.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	mobiler; pengadaan alat studio	5,00	0	2,00	0	1,00	112.563.750	0,00	6.531.908	0,00	8.357.490	0,00	42.286.830	0,00	55.358.095	0,00	112.534.323	0,00	99,97	2,00	112.534.323	40,00	#DIV/0!	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
				alat pendingin	50,00		32,00	1,00		0,00		0,00		0,00					0,00				32,00							
				pengadaan alat rumah tangga	6,00		4,00	1,00		0,00		0,00		0,00					1,00				100,00	5,00						
				bulan				12,00											12,00				100,00	12,00						
				alat kesehatan olah raga;	3,00		0,00	1,00		0,00		0,00		0,00					0,00				0,00	0,00						
3	3.00.02.012.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	bulan	72,00	1.291.246.455	42,00	763.908.216	12,00	180.000.000	0,00	0	6,00	127.709.000	0,00	0	6,00	52.196.580	12,00	179.905.580	100,00	99,95	54,00	943.813.796	75,00	73,09	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
4	3.00.02.012.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional	unit kendaraan dinas roda 4	58,00	925.777.024	39,00	490.709.053	11,00	83.102.364	0,00	12.755.911	4,00	9.488.060	5,00	22.037.041	2,00	37.193.874	11,00	81.474.886	100,00	98,04	50,00	572.183.939	86,21	61,81	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
5	3.00.02.012.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terkelaksananya pemeliharaan AC, Tabung Pemadam kebakaran dan mesin pompa air beserta suku cadang	1) unit AC	65,00	314.639.247	60,00	153.855.400	35,00	32.500.000	0,00	1.980.000	5,00	6.464.000	0,00	0	30,00	23.971.000	35,00	32.415.000	100,00	99,74	95,00	186.270.400	146,15	59,20	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
				2) buah	20,00		10,00	14,00		0,00		0,00		0,00				14,00				100,00	24,00	120,00						
6	3.00.02.012.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang di perbaiki	unit		948.900.000		256.615.000	1,00	19.885.200	0,00	0	0,00	0	1,00	0	1,00	19.769.000	2,00	19.769.000	200,00	99,42	2,00	276.384.000	#DIV/0!	29,13	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
7	3.00.02.012.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Perbaikan Sound System, Telepon, Faximile, CCTV dan jaringan, Kamera dan Projector	bulan	72,00	93.249.550	48,00	55.241.000	12,00	13.000.000	0,00	0	6,00	6.774.900	3,00	0	3,00	6.220.500	12,00	12.995.400	100,00	99,96	60,00	68.236.400	83,33	73,18	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
8	3.00.02.012.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terkelaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer, scan dan Jaringan Komputer	unit UPS	25,00	458.359.885	20,00	303.987.900	15,00	30.000.000	0,00	0	0,00	15.720.000	0,00	8.288.500	0,00	5.910.000	0,00	29.918.500	0,00	99,73	20,00	333.906.400	80,00	72,85	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
				unit printer;	25,00		20,00	30,00		0,00		0,00		4,00				10,00				46,67	34,00	136,00						
				unit laptop;	25,00		15,00	30,00		0,00		0,00		2,00				13,00				50,00	30,00	120,00						
				unit komputer PC;	30,00		20,00	33,00		0,00		5,00		3,00				12,00				60,61	40,00	133,33						
				LS jaringan komputer	5,00		3,00	1,00		0,00		1,00		0,00				1,00				200,00	5,00	100,00						
				unit scan	6,00		4,00	3,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00	4,00	66,67						
9	3.00.02.012.9	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer, laptop dan printer	unit komputer PC;	30,00		2																							



No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket																				
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
4	3.00.02.2.4	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah Dan Swasta	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Book)	buku	150,00	838.750.000	50,00	355.736.934	20,00	17.629.749	0,00	1.605.582	0,00	840.000	0,00	572.000	20,00	13.363.950	20,00	16.381.532	100,00	92,92	70,00	372.118.466	46,67	44,37	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
5	3.00.02.2.5	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	modul	10,00	2.509.710.200	5,00	1.558.000.090	7,00	641.521.800	0,00	33.288.815	0,00	73.197.930	5,00	40.185.108	7,00	412.408.648	12,00	559.080.501	171,43	87,15	17,00	2.117.080.591	170,00	84,36	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
6	3.00.02.2.6	Penyusunan KUA/PPAS APBD	Tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2021 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020	eksemplar	3.400,00	1.262.620.000	2.000,00	841.551.273	650,00	282.346.600	0,00	0	0,00	780.000	0,00	17.798.613	1.385,00	190.495.870	1.385,00	209.074.483	213,08	74,05	3.385,00	1.050.625.756	99,56	83,21	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				dokumen	10,00		8,00		2,00		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00		2,00		100,00		10,00		100,00		BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
7	3.00.02.2.7	Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdistribusikan ke kabupaten/kota	dokumen (RKPD; EKPd; Kalender Perencanaan; P3book)	20,00	429.000.000	16,00	267.001.750	4,00	31.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	31.000.000	2,00	31.000.000	50,00	100,00	18,00	298.001.750	90,00	69,46	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
8	3.00.02.2.8	Penyusunan RKPD	Buku RKPD Tahun 2021 dan RKPD Perubahan 2020	eksemplar	1.600,00	1.727.410.000	1.280,00	906.193.794	320,00	210.722.450	0,00	81.581.922	0,00	12.550.000	0,00	7.966.591	380,00	180.590.873	380,00	282.689.386	118,75	134,15	1.660,00	1.188.883.180	103,75	68,82	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				dokumen	12,00		8,00		2,00		0,00	0,00	2,00		2,00				4,00		200,00		12,00		100,00		BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				90,55		#DIV/0!																									
Predikat Kinerja																				ST		#DIV/0!																									
3.00.02.3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	280,00	35.647.199.040	360,00	12.987.437.394	90,00	5.675.900.858	0,00	909.112.601	50,00	1.081.909.559	25,00	1.071.212.198	15,00	2.321.706.387	90,00	5.383.940.745	100,00	94,86	450,00	18.371.378.139	160,71	51,54																						
1	3.00.02.3.1	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Jenis Dokumen	1,00	100.000.000	0,00	0	1,00	122.639.200	0,00	63.104.317	0,00	0	1,00	8.830.600	0,00	29.562.550	1,00	101.497.467	100,00	82,76	1,00	101.497.467	100,00	101,50	BAPPEDA	Ji. Khatib Sulaiman No. 1																			
2	3.00.02.3.2	Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Perencanaan dan Implementasi program IPDMIP yang terkoordinasi	1) orang	120,00	398.075.000	60,00	804.648.858	60,00	2.336.283.000	0,00	39.443.650	0,00	618.054.163	0,00	600.609.965	0,00	1.060.771.478	0,00	2.318.879.256	0,00	99,26	60,00	3.123.528.114	50,00	784,66	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				2) orang	250,00		100,00	120,00			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		66,67		180,00		72,00		BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																				
				dokumen				1,00							1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																				
3	3.00.02.3.3	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tersedianya buku laporan pelaksanaan	laporan	6,00	831.920.000	4,00	446.959.141	1,00	34.492.579	0,00	18.026.282	0,00	0	0,00	2.288.000	1,00	0	1,00	20.314.282	100,00	58,89	5,00	467.273.423	83,33	56,17	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
4	3.00.02.3.4	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019	eksemplar	400,00	1.186.200.000	300,00	756.347.023	65,00	77.744.830	0,00	8.094.438	0,00	0	0,00	0	65,00	60.620.723	65,00	68.715.161	100,00	88,39	365,00	825.062.184	91,25	69,56	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				buku	4,00		3,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00		100,00		4,00		100,00			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																				
5	3.00.02.3.5	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	kali	22,00	651.000.000	16,00	133.416.694	4,00	14.298.400	0,00	9.848.916	0,00	0	0,00	0	4,00	4.349.950	4,00	14.198.866	100,00	99,30	20,00	147.615.560	90,91	22,68	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				eksemplar	110,00		80,00	20,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20,00		100,00		100,00		100,00		90,91		BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
6	3.00.02.3.6	Kerjasama Ekonomi Regional Dan Internasional ok	1.Laporan kerjasama ekonomi regional dan internasional 2.Mengikuti Rakorgub Se-Sumatera 3.Mengikuti Rapat Teknis Rakorgub se Wilayah Sumatera 4.Mengikuti kegiatan IMT-GT	1.) dokumen	5,00	6.005.500.000	3,00	2.891.204.434	1,00	374.116.579	0,00	47.726.392	0,00	4.309.422	0,00	0	1,00	307.900.335	1,00	359.936.149	100,00	96,21	4,00	3.251.140.583	80,00	54,14	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				2.) kali				1,00								1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				4.) negara				2,00								2,00		2,00		100,00		2,00		#DIV/0!			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				5.) Kementerian				8,00								8,00		8,00		100,00		8,00		#DIV/0!			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				3.) kali				1,00								1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
7	3.00.02.3.7	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	Terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera B	laporan	5,00	526.600.000	3,00	210.674.321	1,00	18.315.126	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	16.916.337	1,00	16.916.337	100,00	92,36	4,00	227.590.658	80,00	43,22	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
8	3.00.02.3.8	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	dokumen	6,00	1.712.600.000	4,00	787.257.127	1,00	51.917.357	0,00	27.543.863	0,00	0	0,00	0	1,00	0	1,00	27.543.863	100,00	53,05	5,00	814.800.990	83,33	47,58	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
9	3.00.02.3.9	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	Dokumen perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang harmonis dan sinkron	dokumen	25,00	1.463.160.000	20,00	201.773.553	1,00	170.646.701	0,00	45.120.000	0,00	51.776.291	0,00	44.395.000	1,00	29.343.700	1,00	170.634.991	100,00	99,99	21,00	372.408.544	84,00	25,45	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
10	3.00.02.3.10	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	kali	300,00	1.333.000.000	180,00	319.291.719	20,00	135.962.528	2,00	46.589.192	4,00	35.077.328	0,00	15.000.000	2,00	28.759.988	8,00	125.426.508	40,00	92,25	188,00	444.718.227	62,67	33,36	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
11	3.00.02.3.11	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan yang sinkron	orang	800,00	1.079.864.140	400,00	362.137.467	200,00	25.801.721	0,00	20.844.211	0,00	4.068.950	0,00	0	0,00	375.000	0,00	25.288.161	0,00	98,01	400,00	387.425.628	50,00	35,88	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				dokumen				1,00								1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
12	3.00.02.3.12	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha yang sinkron	dokumen		1.078.613.650		336.483.952	1,00	14.629.450		14.007.738		198.200		0	1,00	375.000	1,00	14.580.938	100,00	99,67	1,00	351.064.890	#DIV/0!	32,55	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				orang	800,00		400,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00		50,00			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
13	3.00.02.3.13	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	eksemplar	50,00	1.106.500.000	40,00	163.081.578	10,00	127.153.800	0,00	44.663.683	0,00	31.289.800	0,00	20.340.000	0,00	30.894.720	0,00	127.188.203	0,00	100,03	40,00	290.269.781	80,00	26,23	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				dokumen	5,00		4,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00		100,00		5,00		100,00			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																				
14	3.00.02.3.14	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	laporan	5,00	572.950.000	4,00	51.917.481	1,00	15.350.956	0,00	9.327.870	0,00	3.958.100	0,00	0	1,00	2.061.025	1,00	15.346.995	100,00	99,97	5,00	67.264.476	100,00	11,74	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				eksemplar	25,00		20,00	5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20,00		80,00			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
15	3.00.02.3.15	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah	Dokumen Perencanaan Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron - Tersusunnya Ranperda Pembangunan infrastruktur Berkelanjutan	buku	50,00	1.434.580.000	30,00	409.866.484	10,00	142.712.450	0,00	49.554.165	0,00	37.747.300	0,00	24.289.480	0,00	30.180.000	0,00	141.770.945	0,00	99,34	30,00	551.637.429	60,00	38,45	BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																			
				dokumen	5,00		3,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00		100,00		4,00		80,00			BAPPEDA	Bappeda Provinsi Sumatera Barat																				
16	3.00.02.3.16	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan	eksemplar	50,00	978.533.500	30,00	318.660.358	10,00	41.																																					



**Lampiran II.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Provinsi Sumatera Barat**

**OPD : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>PERENCANAAN</b>				<b>36.103.485.416</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>				<b>39.812.061.830</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>95%</b>	<b>19.631.906.416</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>21.679.738.128</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</b>		<b>85%</b>	<b>663.159.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>663.159.000</b>	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Padang	2 dokumen	281.383.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	281.383.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Bappeda yang disusun	Padang	1 dokumen	24.861.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	24.861.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA Bappeda yang disusun	Padang	1 dokumen	24.861.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	24.861.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Bappeda yang disusun	Padang	1 dokumen	27.527.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	27.527.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA Bappeda yang disusun	Padang	1 dokumen	27.527.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	27.527.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Padang	4 dokumen	212.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	212.000.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Padang	4 dokumen	65.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	65.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>11.781.241.416</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>11.781.241.416</b>	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN Bappeda yang dibayarkan dalam 1 tahun	Padang	100 orang	10.971.561.416	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	85 orang	10.971.561.416	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Padang	12 bulan	692.862.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	22 orang	692.862.000	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang di Verifikasi dan ditata dengan baik SKPD	Padang	12 bulan	32.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 dokumen	32.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Padang	1 laporan	19.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	19.500.000	
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditanggapi	Padang	3 laporan	14.950.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	14.950.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Padang	13 laporan	49.868.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13 laporan	49.868.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>262.028.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>262.028.000</b>	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD, RKBMD-P, RKPBMMD, dan RKPBMMD-P	Padang	4 laporan	9.750.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	9.750.000	
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	Padang	11 unit	143.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11 unit	143.000.000	
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited	Padang	4 laporan	72.150.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	72.150.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah yang tertata dengan baik	Padang	12 bulan	37.128.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	37.128.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi Kepegawaian</b>		<b>12 bulan</b>	<b>367.053.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>367.053.000</b>	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	Padang	88 stel	85.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	88 stel	85.800.000	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian yang terdata dan dikelola dengan baik	Padang	12 bulan	54.080.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 kali	54.080.000	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang di laksanakan dan yang di ikuti	Padang	4 kali	97.173.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 kali	97.173.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Bappeda yang mengikuti Bimtek	Padang	20 orang	130.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	20 orang	130.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi Umum</b>		<b>12 bulan</b>	<b>3.006.491.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>5.054.322.712</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Padang	12 bulan	26.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24 jenis	26.000.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Padang	12 bulan	1.410.935.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 jenis	2.478.766.712	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	Padang	12 bulan	32.678.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	17 jenis	32.678.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dukungan penerapan new normal - Logistik kantor yang disediakan	Padang	- 12 bulan - 12 bulan	650.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75 jenis	650.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	12 bulan	47.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 jenis	47.000.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Padang	2 jenis	15.678.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 jenis	15.678.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Padang	12 bulan	520.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 laporan	1.500.000.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	Padang	13 bulan	304.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 orang 3 Aplikasi	304.200.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>		<b>87%</b>	<b>50.529.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>50.529.000</b>	
05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubeler yang diadakan	Padang	1 jenis	33.629.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 jenis	33.629.000	
07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang diadakan	Padang	1 jenis	16.900.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 jenis	16.900.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah</b>		<b>87%</b>	<b>2.492.423.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>2.492.423.000</b>	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Padang	12 bulan	9.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	500 Surat	9.750.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Data dan Informasi yang diamankan - Rekening tagihan air yang di bayarkan - Rekening tagihan internet yang di bayarkan - Rekening tagihan listrik yang di bayarkan - Rekening tagihan telepon yang di bayarkan - Sewa collocation yang dibayarkan	Padang	12 bulan 600 meter kubik 80 mbps 245000 KVA 8 rekening 12 bulan	938.324.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	938.324.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Honor PTT - Jasa Instruktur Senam - Jasa Kebersihan kantor - Jasa Penceramah Agama - Jasa Pengaman Kantor - Jasa Sopir Kantor	Padang	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.544.349.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	25 orang	1.544.349.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>		<b>87%</b>	<b>1.008.982.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</b>		<b>100%</b>	<b>1.008.982.000</b>	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Padang	1 unit	53.547.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	53.547.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Padang	10 unit	464.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 unit	464.100.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Padang	12 bulan	86.775.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24 Unit	86.775.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang di pelihara	Padang	1 unit	374.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	374.400.000	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Padang	12 bulan	30.160.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Unit	30.160.000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPDP provinsi</b>		<b>80%</b>	<b>4.339.739.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPDP provinsi</b>		<b>85%</b>	<b>4.103.233.673</b>	
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>2.839.195.000</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>2.306.233.673</b>	
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Analisa Dukungan penyusunan dokumen perencanaan	Sumatera Barat	1 dokumen	120.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	120.000.000	
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Rencana Pembangunan lainnya yang di integrasikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan daerah	Sumatera Barat	1 dokumen	169.195.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. - Laporan Hasil Fasilitas KPBU. - Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021-2026.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen 1 dokumen	260.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPDP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsultasi publik yang dilaksanakan	Sumatera Barat	2 kali	300.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	150.000.000	
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Forum Perangkat Daerah yang dikoordinir	Sumatera Barat	51 perangkat daerah	150.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	76.233.673	
05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	- Musrenbang RKPDP Provinsi Tahun 2022 yang dilaksanakan - Musrenbang RPJMD Provinsi tahun 2021-2024 yang dilaksanakan	Sumatera Barat	- 1 kali - 1 kali	600.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Musrenbang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	500.000.000	
06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	- Dokumen RKPDP Tahun 2022 dan RKPDP Perubahan Tahun 2021 - Dokumen RPJMD Tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 2 dokumen - 1 dokumen	1.500.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	1.200.000.000	
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>523.055.000</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>710.000.000</b>	
01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Buku Analisa Database Pembangunan Daerah - Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : edatabase	Sumatera Barat	- 100 exemplar - 1 aplikasi	114.139.000	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	180.000.000	
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Sumatera Barat	1 dokumen	70.737.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Sumatera Barat	1 laporan	116.179.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	Sumatera Barat	1 dokumen	150.000.000	
04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	- Buku Profil Daerah Provinsi Sumatera Barat - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	- 100 exemplar - 1 video	222.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Profil Daerah Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	230.000.000	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan</b>		<b>75%</b>	<b>977.489.000</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan</b>		<b>75%</b>	<b>1.087.000.000</b>	
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Evaluasi pelaksanaan dokumen rencana perangkat daerah tahunan	Sumatera Barat	1 laporan	130.591.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	150.000.000	
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan pelaksanaan kerjasama daerah	Sumatera Barat	1 laporan	15.878.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	75.000.000	
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Dokumen capaian Pembangunan Daerah yang disusun APBD, DAK, dan Dekon/TP. - Evaluasi Data dan Informasi rencana pembangunan daerah tahunan yang dikelola melalui simonevdokrenda. - Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	Sumatera Barat	- 3 dokumen - 1 aplikasi - 30 kali	162.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	162.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kab/Kota yang difasilitasi. - Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kab/Kota yang dievaluasi. - Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Kab/Kota yang difasilitasi.	Sumatera Barat	19 dokumen 13 dokumen 19 dokumen	669.020.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kab/Kota yang difasilitasi. - Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kab/Kota yang difasilitasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	19 dokumen 19 dokumen	700.000.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>80%</b>	<b>12.131.840.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi</b>		<b>100%</b>	<b>14.029.090.029</b>	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>8 dokumen</b>	<b>3.445.000.000</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>2.999.705.887</b>	
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Pembangunan Manusia.  - Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Pemerintahan  - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia  - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	1 laporan  1 laporan  1 dokumen  2 dokumen	450.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	361.255.887	
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Sumatera Barat	11 Perangkat Daerah	345.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada	Kota Padang,	3 rumusan	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah - Verifikasi Rancangan Perubahan Renja - Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah - Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah				Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bidang Pemerintahan	Padang Barat, Flamboyan Baru			
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sumatera Barat	1 laporan	450.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Barat	1 Laporan	117.377.250	
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Barat	1 dokumen	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	150.000.000	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	2 dokumen	575.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	622.765.000	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD  - Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD - Verifikasi Rancangan Renja PD  - Verifikasi Rancangan Renja Perubahan PD - Verifikasi Rancangan Renstra PD	Sumatera Barat	21 Perangkat Daerah	575.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	696.750.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sumatera Barat	1 laporan	400.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	1 Laporan	282.627.750	
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Pembangunan Manusia - Verifikasi pelaporan Randa PUG (B12 Tahun 2020, B03, B06 dan B09 Tahun 2021) - Verifikasi usulan DAK Kab/Kota tahun 2022	Sumatera Barat	1 dokumen  608 kali  19 Kabupaten/Kota	450.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	518.930.000	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>1.727.316.000</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>2.302.960.217</b>	
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 laporan  1 dokumen	335.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	550.000.000	
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi usulan DAK Kab/Kota tahun 2022	Sumatera Barat	6 Perangkat Daerah  19 kab/kota	214.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	295.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 laporan	151.800.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 Laporan	157.960.217	
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang perekonomian  - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 laporan  1 dokumen	132.196.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	150.000.000	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Sumberdaya Alam  - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumberdaya Alam	Sumatera Barat	1 laporan  1 laporan	400.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	500.000.000	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	- verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022  - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi usulan DAK Kab/Kota tahun 2022	Sumatera Barat	5 Perangkat Daerah  19 kab/kota	195.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	300.000.000	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Sumatera Barat	1 laporan	151.200.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	1 Laporan	200.000.000	
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Alam	Sumatera Barat	1 laporan	148.120.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat,	1 Laporan	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		- Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam		1 dokumen				Flamboyen Baru			
	<b>5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>6.959.524.000</b>	<b>5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>8.726.423.925</b>	
<b>01</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan, SDA dan Lingkungan Hidup  - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan, SDA dan Lingkungan Hidup	Sumatera Barat	1 laporan  1 dokumen	400.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyen Baru	2 dokumen	800.000.000	
<b>02</b>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi usulan DAK Kab/Kota tahun 2022	Sumatera Barat	6 Perangkat Daerah  19 kab/kota	230.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyen Baru	3 rumusan	400.000.000	
<b>03</b>	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Sumatera Barat	1 laporan	180.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyen Baru	1 Laporan	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		- Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		1 laporan							
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, kebinamargaan dan Perhubungan  - Laporan dukungan program dan kegiatan IPDMIP - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Kebinamargaan dan Perhubungan	Sumatera Barat	1 laporan  1 Laporan  1 dokumen	5.469.659.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	5.469.659.000	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan  - Rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Sumatera Barat	1 laporan  1 laporan	400.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	800.000.000	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022.  - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi usulan DAK Kab/Kota tahun 2022	Sumatera Barat	1 Perangkat Daerah    19 kab/kota	85.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	306.764.925	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Sumatera Barat	1 laporan	102.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	1 Laporan	250.000.000	
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan. - Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan.	Sumatera Barat	1 laporan 1 dokumen	92.865.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	350.000.000	
<b>Jumlah</b>					<b>36.103.485.416</b>	<b>Jumlah</b>				<b>39.812.061.830</b>	

**Lampiran IV**  
**Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Perkiraan Maju tahun 2023**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Nama OPD : : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	01				<b>PERENCANAAN</b>			39.812.061.830						41.899.321.058
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	21.679.738.128				100 persen	22.695.097.058
5	01	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85%	663.159.000				85%	729.473.300
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	281.383.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		2 dokumen	309.521.300
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	24.861.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 dokumen	27.347.000
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	24.861.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 dokumen	27.347.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	27.527.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 dokumen	30.279.000
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	27.527.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 dokumen	30.279.000
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	212.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		4 dokumen	233.200.000
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	65.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		4 dokumen	71.500.000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>11.781.241.416</b>				<b>100%</b>	<b>12.959.877.958</b>
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	85 orang	10.971.561.416	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		85 orang	12.069.230.158

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	22 orang	692.862.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		22 orang	762.148.000
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 dokumen	32.500.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		10 dokumen	35.750.000
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	19.500.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 laporan	21.450.000
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	14.950.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 laporan	16.445.000
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13 laporan	49.868.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		13 laporan	54.854.800
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>262.028.000</b>				<b>100%</b>	<b>288.230.800</b>

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	9.750.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		4 dokumen	10.725.000
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11 unit	143.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		11 unit	157.300.000
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	72.150.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		3 dokumen	79.365.000
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	37.128.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 dokumen	40.840.800
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>367.053.000</b>	<b>APBD</b>			<b>100%</b>	<b>403.758.000</b>
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	88 stel	85.800.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		88 stel	94.380.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 kali	54.080.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		12 kali	59.488.000
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 kali	97.173.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		4 kali	106.890.000
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	20 orang	130.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		20 orang	143.000.000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>5.054.322.712</b>				<b>100%</b>	<b>4.406.630.300</b>
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24 jenis	26.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		24 jenis	28.600.000
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 jenis	2.478.766.712	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		2 unit	1.662.028.500

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	17 jenis	32.678.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		17 jenis	35.945.800
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75 jenis	650.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		75 jenis	770.000.000
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 jenis	47.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		10 jenis	51.700.000
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 jenis	15.678.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		2 jenis	17.245.800
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 dokumen	1.500.000.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		12 laporan	1.506.490.200
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 orang 3 Aplikasi	304.200.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		4 orang 3 Aplikasi	334.620.000

Kodefikasi				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>50.529.000</b>			<b>100%</b>	<b>55.581.900</b>
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 jenis	33.629.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	2 jenis	36.991.900
5	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 jenis	16.900.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	1 jenis	18.590.000
5	01	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>2.492.423.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.741.665.300</b>
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	500 Surat	9.750.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	500 Surat	10.725.000
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	938.324.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	700 meter kubik 100 mbps 245000 KVA 8 rekening	1.032.156.400

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	25 orang	1.544.349.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		25 orang	1.698.783.900
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik</b>		<b>100%</b>	<b>1.008.982.000</b>				<b>100%</b>	<b>1.109.879.500</b>
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	53.547.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 unit	58.901.000
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 unit	464.100.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		10 unit	510.510.000
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24 Unit	86.775.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		24 Unit	95.452.500
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	374.400.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1 unit	411.840.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Unit	30.160.000	APBD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		2 Unit	33.176.000
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi</b>		<b>85 persen</b>	<b>4.103.233.673</b>				<b>85 persen</b>	<b>4.655.200.000</b>
5	01	02	1.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>2.306.233.673</b>				<b>3 dokumen</b>	<b>2.692.000.000</b>
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	120.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	132.000.000
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. - Laporan Hasil Fasilitasi KPBU. - Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021-2026.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	260.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	300.000.000
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	150.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	180.000.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	76.233.673	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	80.000.000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Musrenbang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	500.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	600.000.000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	1.200.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	1.400.000.000
5	01	02	02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>710.000.000</b>				<b>1 dokumen</b>	<b>795.000.000</b>
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	180.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	195.000.000
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	150.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	180.000.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	Sumatera Barat	1 dokumen	150.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	170.000.000
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Profil Daerah Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	230.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	250.000.000
5	01	02	1.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan</b>		<b>75 persen</b>	<b>1.087.000.000</b>				<b>75 persen</b>	<b>1.168.200.000</b>
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	150.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	170.000.000
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	75.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	100.000.000
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	162.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	178.200.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kab/Kota yang difasilitasi. - Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kab/Kota yang difasilitasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	19 dokumen 19 dokumen	700.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	19 dokumen 19 dokumen	720.000.000	
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi</b>		<b>100 persen</b>	<b>14.029.090.029</b>			<b>100 persen</b>	<b>14.549.024.000</b>	
5	01	03	1.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>2.999.705.887</b>			<b>1 dokumen</b>	<b>2.665.843.400</b>	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	361.255.887	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	2 dokumen	236.500.000	
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	250.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	3 rumusan	379.500.000	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	117.377.250	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 Laporan	121.937.200	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	150.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	123.906.200
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	622.765.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	412.500.000
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	696.750.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	632.500.000
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	1 Laporan	282.627.750	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	264.000.000
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	518.930.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	495.000.000
5	01	03	1.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>23 dokumen</b>	<b>2.302.960.217</b>				<b>23 dokumen</b>	<b>2.013.200.000</b>

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	550.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	350.000.000
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	295.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	235.400.000
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 Laporan	157.960.217	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	166.980.000
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	150.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	220.000.000
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	500.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	440.000.000
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang SDA.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	300.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	214.500.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	1 Laporan	200.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	166.320.000
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	150.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	220.000.000
5	01	03	1.03		<b>5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>8 dokumen</b>	<b>8.726.423.925</b>				<b>8 dokumen</b>	<b>9.869.980.600</b>
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Barat	2 dokumen	800.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	850.000.000
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	400.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	425.000.000
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	350.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	400.000.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2022				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan perencanaan pembangunan hasil sinergitas bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	5.469.659.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	6.364.980.600
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	2 dokumen	800.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	840.000.000
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	306.764.925	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	315.000.000
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Sumatera Barat	1 Laporan	250.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	275.000.000
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan perencanaan pembangunan hasil sinergitas bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	350.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	400.000.000
									<b>39.812.061.830</b>					<b>41.899.321.058</b>